LITMAPS EDU: Journal Review of Educational Research
https://pusdig.biz.id/index.php/litmapsedu
Volume 1 | Nomor 1 | Juni |2026
e-ISSN: XXXX-XXXX dan p-ISSN: XXXX-XXXX



Analisis Implementasi Pendidikan Berkualitas dan Pendidikan Inklusif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia

Kalyana Larasati [1*], Nimas Bening Pambudi [2], Indah Prabawati [3], Wilda Sumarsyah[4]

[1] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 25040674089@mhs.unesa.ac.id
[2] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, 25040674059@mhs.unesa.ac.id
[3] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, indahprabawati@unesa.ac.id
[4] Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, wildasumarsyayh@unesa.ac.id

Article Info

Kata Kunci:
Anak Berkebutuhan Khusus; Kualitas Pendidikan; Pendidikan Berkualitas; Pendidikan Inklusif; SDGs

Article History
Received: 2026-05-29
Reviewed: 2026-06-27
Accepted: 2026-06-29

Lisensi: CC-BY-SA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, khususnya pada tujuan keempat yaitu Quality Education. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan data dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidakmerataan akses pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, tingginya biaya pendidikan, serta metode pembelajaran yang kurang inovatif. Selain itu, implementasi pendidikan inklusif telah memberikan dampak positif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), seperti meningkatkan kemampuan sosial, rasa percaya diri, dan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan siswa reguler. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif masih mengalami kendala, antara lain kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK), minimnya tenaga konseling dan terapis, serta rendahnya pemahaman guru reguler mengenai pendidikan inklusif. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui program SATAP, SM3T, Program Calistung, dan pengembangan sekolah inklusif. Secara keseluruhan, implementasi pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pencapaian SDGs di Indonesia.

Corresponding Author
Kalyana Larasati
Universitas Negeri Surabaya; 25040674089@mhs.unesa.ac.id

How to Cite This Article (APA)
Larasati, K. et al. (2026). Analisis Implementasi Pendidikan Berkualitas dan Pendidikan Inklusif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *LITMAPS EDU: Journal Review of Educational Research,* 1(1), 57–70. https://doi.org/10.54065/Litmapsedu.1.1.2026.21

1. INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung kemajuan suatu negara. Melalui pendidikan, masyarakat dapat mengembangkan kemampuan berpikir, pengetahuan, keterampilan, karakter, serta sikap sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial karena memberi kesempatan kepada setiap individu untuk memperoleh akses terhadap

pengetahuan dan pengembangan diri. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu agenda utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat, yaitu Quality Education, yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, berkualitas, dan mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang (UNESCO, 2024).

Pada konteks Indonesia, upaya peningkatan kualitas pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan mutu pembelajaran, pemerataan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa capaian peserta didik Indonesia pada bidang matematika, membaca, dan sains masih berada di bawah rata-rata negara OECD, sehingga menunjukkan perlunya penguatan kualitas pembelajaran di sekolah (OECD, 2023).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan kurikulum, tetapi juga perlu didukung oleh kesiapan guru, lingkungan belajar yang kondusif, metode pembelajaran yang inovatif, dan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kebutuhan peserta didik. Selain persoalan capaian belajar, pendidikan di Indonesia juga masih menghadapi masalah pemerataan layanan pendidikan. Data pendidikan nasional menunjukkan bahwa kondisi sekolah, ketersediaan ruang kelas, sanitasi, dan jumlah guru masih menjadi indikator penting dalam melihat mutu layanan pendidikan di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2024).

Keterbatasan sarana dan prasarana dapat memengaruhi kualitas proses belajar, terutama di daerah yang memiliki akses pendidikan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan perlu dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari hasil belajar siswa, tetapi juga dari kesiapan sekolah dalam menyediakan layanan pembelajaran yang layak, aman, dan mendukung kebutuhan semua peserta didik. Permasalahan pendidikan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Pendidikan bagi ABK merupakan bagian penting dari prinsip pendidikan inklusif karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama peserta didik reguler dalam lingkungan sekolah yang sama, dengan tetap memperhatikan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik masing-masing peserta didik. Pendidikan inklusif tidak hanya dimaknai sebagai penerimaan ABK di sekolah reguler, tetapi juga sebagai proses penyediaan layanan pembelajaran yang adaptif, fasilitas yang mendukung, serta lingkungan sosial yang ramah terhadap keberagaman peserta didik (Astuti & Putri, 2024).

Pelaksanaan pendidikan inklusif memiliki dampak positif bagi perkembangan ABK, baik dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun kemandirian. Melalui pendidikan inklusif, ABK dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan adaptasi sosial. Di sisi lain, peserta didik reguler juga dapat belajar menghargai perbedaan, mengembangkan empati, serta membangun sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan inklusif juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan nilai multikultural karena peserta didik belajar dalam lingkungan yang menerima keberagaman kondisi fisik, sosial, budaya, dan kemampuan belajar (Agustin et al., 2024).

Meskipun memiliki manfaat yang besar, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah

keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi. Keberadaan GPK sangat penting karena guru reguler sering kali belum memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani karakteristik dan kebutuhan belajar ABK. Guru reguler juga dapat mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi kebutuhan peserta didik, menyusun program pembelajaran individual, memilih strategi pembelajaran adaptif, serta melakukan evaluasi perkembangan ABK. Permasalahan guru dalam pendidikan inklusif sering berkaitan dengan belum meratanya pelatihan, ketiadaan GPK, serta keterbatasan latar belakang pendidikan guru dalam bidang pendidikan luar biasa (Wahyuni & Irdamurni, 2024).

Tantangan lain dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah keterbatasan fasilitas pendukung dan kurangnya kesiapan sekolah dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Beberapa sekolah masih belum memiliki ruang layanan khusus, media pembelajaran adaptif, alat bantu belajar, serta sistem asesmen yang sesuai dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi ini dapat menghambat guru dalam mengelola kelas heterogen karena kebutuhan belajar setiap peserta didik tidak selalu dapat dipenuhi dengan pendekatan pembelajaran yang sama. Identifikasi ABK yang belum optimal dan kurangnya fasilitas khusus juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan pendidikan inklusif di sekolah dasar (Rizqi et al., 2025).

Pada praktik pembelajaran, pendidikan inklusif membutuhkan strategi yang fleksibel dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Guru perlu mampu melakukan diferensiasi pembelajaran, menyesuaikan materi, menggunakan media pembelajaran kreatif, serta membangun kerja sama dengan orang tua dan tenaga ahli. Strategi seperti pendekatan personal, peer tutoring, pembelajaran berbasis aktivitas, dan Universal Design for Learning dapat membantu meningkatkan partisipasi ABK dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran yang adaptif dapat mendorong keterlibatan akademik dan sosial ABK, terutama apabila didukung oleh kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga pendukung lainnya (Mauliddiyah & Permata, 2025).

Perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam mendukung pendidikan inklusif. Teknologi adaptif dapat membantu guru dalam menyediakan media pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti penggunaan video pembelajaran, aplikasi interaktif, perangkat asistif, dan media digital yang mudah diakses. Dalam konteks literasi digital, pemanfaatan teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki hambatan tertentu. Pendidikan inklusif berbasis teknologi dapat memperkuat akses pendidikan bagi ABK, terutama di daerah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan tenaga pendidik (Solikhah, 2025).

Pemanfaatan teknologi adaptif juga perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi guru. Teknologi tidak akan memberikan dampak optimal apabila guru belum memiliki kemampuan dalam memilih, menggunakan, dan mengevaluasi media digital sesuai kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pelatihan guru menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif berbasis teknologi. Pendekatan inklusif yang mengintegrasikan teknologi adaptif, nilai sosial-budaya, dan pelatihan guru dapat meningkatkan keterlibatan belajar serta kesejahteraan ABK di lingkungan sekolah (Wulandani, 2025).

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pencapaian SDGs bidang pendidikan di Indonesia masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan pendidikan inklusif. Pendidikan yang berkualitas

tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari sejauh mana sistem pendidikan mampu memberikan layanan yang setara kepada seluruh peserta didik, termasuk ABK. Pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam mewujudkan SDG 4 karena menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, aksesibilitas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif masih berkaitan dengan keterbatasan GPK, rendahnya kompetensi guru dalam menangani ABK, minimnya sarana prasarana, keterbatasan bahan ajar adaptif, dan belum optimalnya pemahaman guru terhadap pembelajaran diferensiasi (Hutapea & Marmoah, 2025).

Sehingga, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, terutama terkait kesiapan guru, ketersediaan GPK, fasilitas pendukung, strategi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan praktik pendidikan inklusif dan pengembangan pembelajaran yang lebih adil, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada pengkajian, penafsiran, dan penyusunan kembali informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan implementasi pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena pendidikan secara mendalam melalui analisis terhadap data nonangka, seperti konsep, kebijakan, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan kualitas pendidikan dan pendidikan inklusif (Creswell & Creswell, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku referensi, laporan lembaga resmi, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaian dengan fokus kajian, yaitu pendidikan berkualitas, pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, kebijakan pendidikan, dan pencapaian SDGs bidang pendidikan. Artikel jurnal yang digunakan diutamakan berasal dari publikasi terbaru agar pembahasan yang dihasilkan sesuai dengan perkembangan isu pendidikan saat ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber yang membahas implementasi kebijakan pendidikan inklusif, termasuk kajian mengenai peran guru, Guru Pendamping Khusus (GPK), fasilitas pendukung, serta kendala pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah (Wahyuni & Irdamurni, 2024; Rizqi et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penelusuran literatur yang relevan dengan menggunakan kata kunci seperti pendidikan berkualitas, pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, SDGs pendidikan, dan implementasi kebijakan pendidikan inklusif. Tahap kedua adalah seleksi sumber berdasarkan relevansi isi, kebaruan publikasi, dan keterkaitan dengan tujuan penelitian. Tahap ketiga adalah membaca dan mencatat informasi penting dari setiap

sumber, terutama yang berkaitan dengan kondisi pendidikan di Indonesia, tantangan pelaksanaan pendidikan inklusif, serta upaya pemerintah dalam mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Tahap keempat adalah pengelompokan data ke dalam beberapa tema utama, yaitu kondisi pendidikan di Indonesia, implementasi pendidikan inklusif, kendala pelaksanaan pendidikan inklusif, dukungan kebijakan, serta kontribusi pendidikan inklusif terhadap pencapaian SDGs.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang paling sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antarisu dapat dijelaskan secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan hasil kajian literatur dengan teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai bagaimana pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif dilaksanakan, tantangan yang muncul, serta sejauh mana implementasi tersebut mendukung pencapaian SDGs bidang pendidikan.

Menganalisis implementasi pendidikan inklusif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Teori ini memandang keberhasilan implementasi kebijakan melalui dua aspek utama, yaitu *content of policy* atau isi kebijakan dan *context of implementation* atau lingkungan implementasi. Aspek isi kebijakan digunakan untuk melihat tujuan, manfaat, sasaran, serta dukungan program pendidikan inklusif. Sementara itu, aspek lingkungan implementasi digunakan untuk menganalisis kesiapan sekolah, peran guru, dukungan pemerintah, ketersediaan GPK, fasilitas pembelajaran, serta respons masyarakat terhadap pendidikan inklusif. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia (Grindle, 1980).

3. RESULT AND DISCUSSION

Gambaran Umum Implementasi Pendidikan Berkualitas dan Inklusif

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Permasalahan pendidikan tidak hanya terjadi pada aspek akses, tetapi juga pada mutu pembelajaran, pemerataan guru, kesiapan sekolah, ketersediaan fasilitas, literasi digital, serta kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan layanan yang setara kepada seluruh peserta didik. Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat, pendidikan berkualitas tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan capaian akademik, tetapi juga sebagai pendidikan yang inklusif, adil, mudah diakses, dan mampu memberikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat (UNESCO, 2024).

Pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif memiliki hubungan yang erat karena keduanya menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan nondiskriminasi. Pendidikan tidak dapat dikatakan berkualitas apabila masih terdapat kelompok peserta didik yang belum memperoleh layanan pendidikan secara layak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Oleh karena itu, implementasi pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian SDGs bidang pendidikan. Selain itu, perkembangan

teknologi digital juga memberi peluang bagi sekolah untuk memperluas akses belajar, menyediakan media pembelajaran yang lebih variatif, serta mendukung kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda (Sumatraputra et al., 2023).

Permasalahan Pendidikan di Indonesia dalam Mendukung SDGs 4

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa permasalahan utama pendidikan di Indonesia yang berpengaruh terhadap pencapaian SDGs 4. Permasalahan tersebut meliputi perubahan kurikulum, ketidakmerataan akses pendidikan, distribusi guru yang belum merata, kualitas guru, biaya pendidikan, metode pembelajaran yang monoton, keterbatasan sarana prasarana, serta rendahnya prestasi belajar siswa. Rangkuman permasalahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Table 1. Permasalahan pendidikan di indonesia dan dampaknya terhadap SDGs 4

No	Permasalahan Pendidikan	Bentuk Permasalahan	Dampak	Rujukan Pendukung
1	Perubahan kurikulum	Guru dan sekolah perlu terus menyesuaikan perangkat ajar, metode pembelajaran, dan asesmen	Pelaksanaan pembelajaran belum merata antar sekolah	OECD, 2023; BPS, 2024
2	Ketidakmerataan akses pendidikan	Fasilitas pendidikan di daerah terpencil masih terbatas	Terjadi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah	BPS, 2024; UNESCO, 2024
3	Distribusi guru belum merata	Beberapa daerah kekurangan guru atau guru mengajar tidak sesuai bidang keahlian	Kualitas pembelajaran belum berjalan optimal	Wahyuni & Irdamurni, 2024
4	Kualitas guru	Sebagian guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional	Siswa kurang aktif dan kurang termotivasi dalam belajar	Dewi et al., 2025
5	Biaya pendidikan	Keluarga kurang mampu masih menghadapi hambatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sekolah	Akses pendidikan belum sepenuhnya setara	BPS, 2024
6	Metode pembelajaran monoton	Pembelajaran masih dominan menggunakan ceramah dan kurang melibatkan siswa secara aktif	Partisipasi dan keterampilan berpikir kritis siswa rendah	Dewi et al., 2025
7	Sarana dan prasarana terbatas	Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi belum merata	Proses pembelajaran kurang mendukung kebutuhan siswa	BPS, 2024; Wulandani, 2025
8	Prestasi belajar rendah	Literasi, numerasi, dan kemampuan sains siswa masih perlu ditingkatkan	Capaian pendidikan nasional belum optimal	OECD, 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia bersifat multidimensi. Rendahnya kualitas pendidikan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan akibat dari hubungan antara kebijakan, sumber daya manusia, fasilitas, kondisi sosial ekonomi, serta proses pembelajaran. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa capaian peserta didik Indonesia pada bidang matematika, membaca, dan sains masih berada di bawah rata-rata OECD, sehingga diperlukan penguatan pembelajaran berbasis literasi, numerasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah (OECD, 2023).

Salah satu permasalahan yang menonjol adalah perubahan kurikulum yang menuntut guru dan sekolah untuk terus beradaptasi. Perubahan kurikulum pada dasarnya bertujuan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman, tetapi dalam praktiknya dapat menimbulkan kendala apabila tidak diikuti dengan pelatihan,

pendampingan, dan kesiapan perangkat pembelajaran. Guru perlu menyesuaikan tujuan pembelajaran, metode, media, dan asesmen sesuai arah kurikulum yang berlaku. Jika proses adaptasi tidak berjalan merata, maka sekolah yang memiliki sumber daya terbatas akan mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum secara optimal.

Selain kurikulum, ketidakmerataan akses pendidikan juga masih menjadi tantangan besar. Sekolah di wilayah perkotaan umumnya memiliki fasilitas pembelajaran, akses internet, dan tenaga pendidik yang lebih memadai dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Sebaliknya, sekolah di wilayah tertinggal masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, alat pembelajaran, jaringan internet, dan jumlah guru. Ketimpangan ini berdampak pada tidak meratanya kualitas pembelajaran yang diterima peserta didik. Dengan demikian, pendidikan berkualitas tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan sekolah, tetapi juga dari kemampuan sekolah menyediakan layanan pembelajaran yang layak, aman, dan sesuai kebutuhan peserta didik (BPS, 2024).

Permasalahan lain yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah distribusi dan kompetensi guru. Guru memiliki peran penting dalam keberhasilan pembelajaran karena berinteraksi langsung dengan siswa. Namun, masih terdapat guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya akibat keterbatasan tenaga pendidik di daerah tertentu. Di sisi lain, sebagian guru juga masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Padahal, pembelajaran berkualitas membutuhkan guru yang mampu menjadi fasilitator, motivator, pembimbing, serta pengembang potensi peserta didik.

Literasi Digital sebagai Pendukung Pendidikan Berkualitas

Pada konteks pendidikan modern, literasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pendidikan berkualitas. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan mencari, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital secara tepat. Penguatan literasi digital menjadi semakin penting karena proses pembelajaran saat ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media digital, sumber belajar daring, aplikasi pembelajaran, dan teknologi interaktif.

Pemanfaatan teknologi pembelajaran dapat membantu guru menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Media digital dapat digunakan untuk menyajikan materi dalam bentuk video, gambar, simulasi, aplikasi interaktif, dan bahan ajar digital. Dalam Jurnal Literasi Digital, penggunaan aplikasi interaktif berbasis Augmented Reality dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar siswa karena materi disajikan secara visual, konkret, dan mudah dipahami (Sumatraputra et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi salah satu strategi untuk mengatasi pembelajaran yang monoton dan meningkatkan keterlibatan siswa.

Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi pendidikan masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek ketersediaan perangkat, akses internet, serta kompetensi digital guru. Sekolah yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital akan mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi secara optimal. Selain itu, guru juga perlu memperoleh pelatihan agar mampu memilih, mengembangkan, dan menggunakan media digital sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya perlu dikembangkan pada peserta didik, tetapi juga pada guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran.

Implementasi dan Dampak Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan bagian penting dalam pencapaian SDGs tujuan keempat karena menekankan prinsip kesetaraan, aksesibilitas, dan nondiskriminasi. Pendidikan inklusif memberikan kesempatan kepada seluruh anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), untuk belajar bersama peserta didik reguler dalam satu lingkungan sekolah yang sama. Pendidikan inklusif tidak hanya berarti menerima ABK di sekolah reguler, tetapi juga menyediakan layanan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, pendidikan inklusif menuntut adanya kurikulum yang fleksibel, strategi pembelajaran adaptif, asesmen yang sesuai, serta dukungan tenaga pendidik yang kompeten (Astuti & Putri, 2024).

Pelaksanaan pendidikan inklusif memberikan dampak positif bagi ABK, terutama dalam aspek sosial, emosional, akademik, dan kemandirian. Melalui pendidikan inklusif, ABK memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa reguler, mengembangkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan melatih kemandirian. Selain itu, peserta didik reguler juga belajar menghargai perbedaan, membangun empati, serta mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya bermanfaat bagi ABK, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya sekolah yang humanis, ramah, dan nondiskriminatif (Ramadhanti & Herawati, 2024).

Pendidikan inklusif juga menjadi salah satu bentuk penguatan hak pendidikan bagi semua anak. Dalam konteks SDGs, pendidikan inklusif menunjukkan bahwa akses pendidikan tidak boleh dibatasi oleh kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, maupun geografis peserta didik. Oleh karena itu, sekolah inklusif perlu dibangun sebagai ruang belajar yang mampu mengakomodasi perbedaan peserta didik melalui pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan individu.

Kendala Implementasi Pendidikan Inklusif

Meskipun pendidikan inklusif memiliki manfaat yang besar, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala utama adalah keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK). Keberadaan GPK sangat penting karena guru reguler tidak selalu memiliki kompetensi khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. GPK berperan membantu guru kelas dalam memahami kebutuhan ABK, menyusun strategi pembelajaran adaptif, mendampingi proses belajar, serta membantu evaluasi perkembangan peserta didik. Namun, jumlah GPK di sekolah inklusif masih terbatas sehingga layanan pendidikan bagi ABK belum sepenuhnya optimal (Wahyuni & Irdamurni, 2024).

Selain keterbatasan GPK, sekolah inklusif juga sering menghadapi kendala berupa tidak tersedianya tenaga konseling dan terapis. Padahal, ABK tidak hanya membutuhkan dukungan akademik, tetapi juga dukungan psikologis, sosial, emosional, dan terapeutik. Jika sekolah tidak memiliki tenaga pendukung tersebut, maka beban pendampingan cenderung bertumpu pada guru kelas dan GPK. Kondisi ini dapat menyebabkan layanan yang diberikan belum maksimal, terutama apabila jumlah ABK cukup banyak dan karakteristik kebutuhannya beragam.

Kendala berikutnya adalah rendahnya pemahaman sebagian guru reguler mengenai pendidikan inklusif. Tidak semua guru memiliki pengalaman atau latar belakang

pendidikan luar biasa, sehingga mereka dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar ABK, menyesuaikan metode pembelajaran, dan melakukan evaluasi perkembangan siswa. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pelatihan guru secara berkelanjutan agar guru reguler memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pembelajaran inklusif, pembelajaran berdiferensiasi, Program Pembelajaran Individual (PPI), dan Universal Design for Learning (UDL) (Hutapea & Marmoah, 2025).

Selain faktor guru, keterbatasan fasilitas adaptif juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif. Beberapa sekolah belum memiliki ruang layanan khusus, alat bantu belajar, media pembelajaran adaptif, aksesibilitas fisik, dan sistem asesmen yang sesuai dengan karakteristik ABK. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan inklusif. Akibatnya, masih terdapat stigma terhadap ABK dan pandangan bahwa pendidikan inklusif hanya menjadi tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Analisis Pendidikan Inklusif Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle

Penelitian ini, implementasi pendidikan inklusif dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Teori ini membagi implementasi kebijakan ke dalam dua aspek utama, yaitu *content of policy* atau isi kebijakan dan *context of implementation* atau lingkungan implementasi. Aspek *content of policy* digunakan untuk melihat tujuan, manfaat, sasaran, dan pelaksana kebijakan pendidikan inklusif. Sementara itu, aspek *context of implementation* digunakan untuk menganalisis kesiapan lingkungan pelaksanaan, seperti kondisi sekolah, dukungan guru, fasilitas, respons masyarakat, dan komitmen pemerintah. Analisis implementasi pendidikan inklusif berdasarkan teori Grindle dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Table 2. Implementasi pendidikan inklusif berdasarkan teori Merilee S. Grindle

Aspek Teori Grindle	Temuan Implementasi Pendidikan Inklusif	Analisis	Rujukan Pendukung
Content of Policy	Pendidikan inklusif bertujuan memberikan akses pendidikan yang setara bagi ABK	Isi kebijakan sudah sesuai dengan prinsip SDGs 4, yaitu pendidikan inklusif dan nondiskriminatif	Grindle, 1980; UNESCO, 2024
Manfaat kebijakan	ABK dapat belajar bersama siswa reguler, meningkatkan interaksi sosial, dan membangun rasa percaya diri	Kebijakan memberi dampak positif bagi perkembangan sosial dan akademik ABK	Ramadhanti & Herawati, 2024; Astuti & Putri, 2024
Sasaran kebijakan	Sasaran utama adalah ABK, guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat	Keberhasilan kebijakan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak	Ningsih et al., 2024
Pelaksana kebijakan	Guru reguler, GPK, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan orang tua	Pelaksanaan belum optimal karena keterbatasan GPK dan tenaga pendukung	Wahyuni & Irdamurni, 2024; Hutapea & Marmoah, 2025
Context of Implementation	Sekolah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, tenaga ahli, media adaptif, dan pemahaman guru reguler	Lingkungan implementasi belum sepenuhnya siap mendukung pendidikan inklusif	Hutapea & Marmoah, 2025; Wulandani, 2025
Respons masyarakat	Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pendidikan inklusif	Sosialisasi perlu ditingkatkan agar pendidikan inklusif diterima secara luas	Astuti & Putri, 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari aspek *content of policy*, pendidikan inklusif telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan hak pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik, termasuk ABK. Isi kebijakan ini sudah sejalan dengan prinsip SDGs 4 yang menekankan pendidikan yang inklusif, merata, dan nondiskriminatif. Namun, dari aspek *context of implementation*, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi tantangan pada kesiapan sekolah, keterbatasan tenaga pendukung, kurangnya fasilitas adaptif, dan rendahnya pemahaman sebagian guru reguler dalam menangani ABK. Dengan demikian, permasalahan utama pendidikan inklusif bukan terletak pada tujuan kebijakan, tetapi pada proses pelaksanaannya di lapangan.

Strategi pembelajaran juga menjadi aspek penting dalam pendidikan inklusif. Guru perlu menggunakan pendekatan yang fleksibel, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan personal, penggunaan media pembelajaran kreatif, *peer tutoring*, dan penyesuaian asesmen. Strategi tersebut membantu ABK mengikuti proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan personal, diferensiasi kurikulum, media pembelajaran kreatif, kolaborasi dengan orang tua, serta prinsip Universal Design for Learning dapat meningkatkan partisipasi akademik dan keterampilan sosial ABK di sekolah inklusif (Mauliddiyah & Permata, 2025).

Upaya Pemerintah dan Sintesis Pencapaian SDGs Bidang Pendidikan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian SDGs bidang pendidikan. Program Satu Atap atau SATAP menjadi salah satu bentuk kebijakan untuk memperluas akses pendidikan dasar, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Program ini membantu peserta didik melanjutkan pendidikan dari jenjang sekolah dasar ke sekolah menengah pertama tanpa harus menempuh jarak yang jauh (Khusna et al., 2021). Selain itu, program pemerataan tenaga pendidik di daerah 3T juga menunjukkan bahwa distribusi guru merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah yang mengalami keterbatasan tenaga pengajar (Khusna et al., 2021).

Penguatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau *Calistung* juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar. Kemampuan *Calistung* merupakan fondasi utama bagi peserta didik untuk memahami pembelajaran pada jenjang berikutnya. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi dapat berdampak pada rendahnya prestasi belajar siswa secara umum. Oleh karena itu, penguatan *Calistung* perlu dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan tidak hanya berorientasi pada hafalan. Dalam era digital, penguatan *Calistung* juga dapat didukung dengan media pembelajaran digital yang interaktif dan sesuai dengan usia peserta didik.

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan sekolah inklusif sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan yang setara bagi seluruh anak. Namun, pengembangan sekolah inklusif tidak cukup hanya dilakukan melalui penetapan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah perlu didukung dengan GPK, pelatihan guru reguler, fasilitas aksesibel, media pembelajaran adaptif, serta sistem asesmen yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Tanpa dukungan tersebut, pendidikan inklusif berisiko hanya menjadi kebijakan administratif yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan peserta didik. Dalam konteks literasi digital, pemanfaatan teknologi dapat menjadi strategi pendukung untuk memperkuat pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif.

Media pembelajaran digital yang aksesibel dapat membantu peserta didik memahami materi sesuai kemampuan masing-masing. Teknologi dapat digunakan dalam bentuk video pembelajaran, aplikasi interaktif, perangkat bantu, media audio-visual, Augmented Reality, dan bahan ajar digital yang mudah diakses. Namun, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan inklusif perlu disertai dengan kesiapan guru, ketersediaan perangkat, serta desain media yang ramah bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Teknologi adaptif dapat membantu meningkatkan keterlibatan belajar ABK apabila digunakan secara tepat dan sesuai kebutuhan peserta didik (Wulandani, 2025).

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa pendidikan berkualitas, pendidikan inklusif, dan literasi digital merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian SDGs tujuan keempat. Pendidikan yang berkualitas harus mampu memberikan layanan yang adil kepada seluruh peserta didik, sedangkan pendidikan inklusif membutuhkan dukungan kualitas pembelajaran, guru yang kompeten, fasilitas yang memadai, teknologi yang aksesibel, dan kebijakan sekolah yang responsif. Oleh karena itu, pencapaian SDGs tujuan keempat di Indonesia perlu dilakukan melalui strategi yang menyeluruh, yaitu meningkatkan kompetensi guru, memeratakan fasilitas pendidikan, memperkuat literasi digital, memperluas layanan pendidikan inklusif, serta membangun kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian literatur, implementasi pendidikan berkualitas dan pendidikan inklusif di Indonesia berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs tujuan keempat. Pendidikan berkualitas tidak hanya dilihat dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan sistem pendidikan menyediakan layanan yang adil, adaptif, dan setara bagi seluruh peserta didik, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakmerataan akses pendidikan, keterbatasan sarana prasarana, distribusi guru yang belum merata, rendahnya literasi dan numerasi, serta keterbatasan Guru Pendamping Khusus (GPK), fasilitas aksesibel, media adaptif, dan sistem asesmen bagi ABK. Berdasarkan teori Merilee S. Grindle, isi kebijakan pendidikan inklusif sudah sejalan dengan prinsip SDGs 4, tetapi lingkungan implementasinya masih perlu diperkuat.

Pemerintah dan sekolah perlu meningkatkan penyediaan GPK, pelatihan guru reguler, fasilitas aksesibel, media pembelajaran adaptif, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran inklusif. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar tercipta lingkungan pendidikan yang ramah dan nondiskriminatif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, atau studi kasus pada sekolah inklusif tertentu. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan inklusif serta membandingkan implementasinya di beberapa daerah.

5. ACKNOWLEDGMENT

-

6. REFERENCES

Agustin, R. D., Zakiah, L., Hasanah, A., Faruqi, M. I., & Maulidina, C. A. (2024). Implementasi pendidikan multikultural pada anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusi. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 9(2),* 875–882. https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2217

Astuti, R. F., & Putri, K. A. (2024). Peran pendidikan inklusif: Strategi dan tantangan dalam penghapusan diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus, 8(2),* 109–119. https://doi.org/10.24036/jpkk.v8i2.926

Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Pendidikan 2024. Badan Pusat Statistik.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.).* SAGE Publications.

Dewi, K. R., Subrata, H., & Puspita, A. M. I. (2025). Implementasi literasi digital di sekolah: Tinjauan pustaka sistematis. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(1).* https://doi.org/10.23969/jp.v10i01.21079

Hutapea, K., & Marmoah, S. (2025). Menuju SDG 4: Faktor penghambat implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu, 9(6).* https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10752

Gotama, P. B. A. P., & Muliastrini, N. K. E. (2026). Pengembangan media pembelajaran berbasis ICT terhadap literasi digital mahasiswa PGSD dalam konteks transformasi era 5.0. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar, 7(1)*. https://doi.org/10.55115/edukasi.v7i1.1448

Hutapea, K., & Marmoah, S. (2025). Menuju SDG 4: Faktor penghambat implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu, 9(6),* 1856–1867. https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i6.10752

Khusna, S. N. I., Djazilan, S., Ibrahim, M., & Rahayu, D. W. (2021). Dampak sekolah satu atap terhadap pola perilaku siswa di sekolah dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(6),* 3553–3564. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.938

Mauliddiyah, I., & Permata, S. D. (2025). Strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar inklusif. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti, 3(1),* 33–41. https://doi.org/10.38048/jpicb.v3i1.4841

Ningsih, A., Suriansyah, A., Harsono, A. M. B., Annisa, M., & Novitawati. (2024). Kolaborasi guru kelas dan guru pendamping dalam meningkatkan kualitas pembelajaran inklusif. *Joyful Learning Journal, 13(4),* 101–109. https://journal.unnes.ac.id/journals/jlj/article/view/18071

OECD. (2023). PISA 2022 results: Indonesia country note. OECD Publishing.

Ramadhanti, I., & *Herawati, N. I. (2024). Implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(2),* 6854–6869. https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.14873

Riady, A. (2021). Pendidikan berkualitas di era digital: Fokus aplikasi sebagai media pembelajaran. *Jurnal Literasi Digital, 1(2), 70*–80. https://doi.org/10.54065/jld.1.2.2021.15

Rizqi, S. A., Indra, G., Abdisetyorini, A., & Zulfadewina. (2025). Pendidikan inklusif di sekolah dasar: Tantangan, identifikasi, dan dukungan fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 5(2).* https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i2.2839

Solikhah, M. (2025). Model pendidikan inklusif berbasis teknologi untuk memperkuat akses pendidikan anak berkebutuhan khusus di daerah 3T. *Jurnal Ilmiah Jendela Pendidikan, 15(1),* 18–25. https://doi.org/10.55129/jp.v15i1.3153

Sumatraputra, A. N., Tapanuli, F. M., & Maringgita, I. (2023). Pemanfaatan aplikasi interaktif berbasis augmented reality untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah menengah. *Jurnal Literasi Digital, 3(3),* 160–170. https://doi.org/10.54065/jld.3.3.2023.599

Sumardi, S. W., Wati, N. P. A., & Werang, B. R. (2025). Pemerataan pendidikan dengan program Sarjana Mendidik Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T): Equalizing education with the undergraduate program educating outermost, disadvantaged, and frontier regions (SM3T). *JAKADARA: Jurnal Ekonomika, Bisnis, dan Humaniora, 4(3),* 95–102. https://doi.org/10.36002/jd.v4i3.4913

UNESCO. (2024). SDG 4: Education 2030. UNESCO. https://www.unesco.org/gem-report/en/quality

Wahyuni, D. S., & Irdamurni. (2024). Permasalahan guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SMK 7 Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(3*), 43379–43385.

Wulandani, N. (2025). Optimalisasi pendidikan inklusif: Peran teknologi adaptif dalam meningkatkan well-being anak berkebutuhan khusus. *Arus Jurnal Pendidikan, 5(2),* 198–205. https://doi.org/10.57250/ajup.v5i2.1592